

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian Indonesia tahun 2019 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp15.833,9 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp59,1 juta atau US\$4 174,9. Perekonomian Indonesia tahun 2018 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp14.837,4 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp56,0 Juta atau US\$3 27,0. Ekonomi Indonesia tahun 2019 tumbuh 5,02%, lebih rendah dibanding pencapaian tahun 2018 sebesar 5,17%. Menurunnya tingkat perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2019 tidak menghalangi perusahaan untuk menjadi lebih baik. Faktor yang menentukan keberhasilan perusahaan dalam menjalankan usahanya adalah kinerja para manajer yang dapat kita lihat dari laporan keuangannya. Semakin besar perusahaan maka semakin kompleks permasalahan yang akan dihadapi oleh sebuah perusahaan, sehingga terbentuklah manajemen modal kerja dimana perusahaan menganggarkan dananya untuk mendukung kinerja perusahaan.

Ketersediaan modal kerja harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut, salah satu pendukung dari modal kerja tersebut adalah piutang. Piutang merupakan salah satu akun dengan kondisi yang tinggi selain kas, sehingga keberadaannya sangat mempengaruhi kinerja perusahaan dan cukup krusial bagi sebuah perusahaan. Pada praktiknya piutang timbul karena adanya transaksi penjualan kredit. Keberadaan piutang menjadi salah satu tolak ukur pada laporan keuangan dimana laporan keuangan merupakan sebuah instrumen yang sangat penting bagi perusahaan untuk dinilai kelayakan operasi perusahaan tersebut. Demi menghindari adanya kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan dalam laporan keuangan, perusahaan membutuhkan jasa pihak ketiga yang independen yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP).

Auditor akan menilai kewajaran dan memberikan jasanya untuk menilai apakah laporan keuangan tersebut telah sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum (PABU). Auditor akan memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan. Jika ditemukan penyimpangan (*fraud*) pada suatu akun, auditor akan mendiskusikan temuan tersebut dan memberikan penyesuaian pada akun tersebut setelah disetujui.

Penyimpangan pada akun piutang di perusahaan sering kali terjadi dengan cara melakukan piutang fiktif, dimana pada level operasional saat pengiriman barang surat tagihannya (*invoice*) tidak jelas ataupun perusahaan yang dituju adalah fiktif. Pada level manajemen, piutang akan dibuat lebih tinggi sehingga pada laporan laba rugi akan terlihat pendapatan perusahaan lebih besar dari yang sebenarnya. (*window-dressing*).

Salah satu contoh kasus piutang fiktif yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun 2018 adalah kasus PT SNP Finance, PT SNP Finance ingin mengajukan pinjaman fasilitas kredit modal kerja kepada sejumlah bank. Plafon kredit yang diajukan adalah sebesar Rp425 miliar dengan jaminan daftar piutang pembiayaan salah satu konsumen PT SNP Finance. Selain itu terjadi kredit macet sebesar Rp141 miliar dan ada catatan pembiayaan namun catatan tersebut adalah fiktif sehingga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPI.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPI.

tidak dapat ditagih. Para tersangka juga belum bisa menyerahkan dokumen perjanjian kontrak pembiayaan yang dijadikan jaminan.

Salah satu perusahaan yang juga memiliki piutang yang cukup besar adalah PT XXX yang memiliki piutang sebesar Rp32.330.517.523 dan cadangan penghapusan piutang sebesar Rp2.185.865.442 dengan total keseluruhan aset lancar sebesar Rp87.812.424.828 sehingga menghasilkan rasio sebesar 34% karena rasio cukup besar tersebut, maka angka piutang PT XXX sangat mempengaruhi laporan keuangan sehingga perlu diaudit untuk menjamin kewajaran nilai piutang yang disajikan PT XXX tersebut, karena informasi nilai piutang tersebut sangat berguna bagi investor/kreditor dalam pengambilan keputusan dikemudian hari.

Berdasarkan uraian diatas, audit atas piutang usaha memiliki peranan penting yang membuat penulis tertarik untuk membahas lebih dalam tentang “**Audit atas Piutang Usaha pada PT XXX oleh KAP Heliantono dan Rekan**”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana tahapan penerimaan audit PT XXX oleh KAP Heliantono dan Rekan ?
2. Bagaimana tahapan perencanaan audit PT XXX oleh KAP Heliantono dan Rekan ?
3. Bagaimana tahapan pelaksanaan audit PT XXX oleh KAP Heliantono dan Rekan ?
4. Bagaimana tahapan pelaporan audit PT XXX oleh KAP Heliantono dan Rekan ?

1.3 Tujuan Penulisan

Sebagaimana yang telah di uraikan sebelumnya, berdasarkan latar belakang diatas maka tujuan penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Menguraikan tahap penerimaan audit PT XXX oleh KAP Heliantono dan Rekan
2. Menguraikan tahap perencanaan audit PT XXX oleh KAP Heliantono dan Rekan
3. Menguraikan tahap pelaksanaan audit PT XXX oleh KAP Heliantono dan Rekan
4. Memaparkan hasil pelaporan audit berdasarkan pemeriksaan atas Piutang Penjualan pada PT XXX

1.4 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari penyusunan Tugas Akhir ini yaitu, bagi Penulis adalah akan digunakan sebagai sarana penerapan pengetahuan yang diperoleh selama masa studi penulis, bagi KAP hasil dari penulisan tugas akhir ini



diharapkan dapat memberikan sebuah masukan yang akan berguna untuk kelangsungan KAP tersebut. Bagi akademik untuk sebagai referensi pembaca agar mendapatkan gambaran yang terjadi pada audit atas piutang usaha

2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Audit

Menurut Tuanakotta (2013:84) tujuan suatu audit ialah mengangkat tingkat kepercayaan dari pemakai laporan keuangan yang dituju, terhadap laporan keuangan itu. Tujuan itu dicapai dengan pemberian opini oleh auditor mengenai apakah laporan keuangan disusun dalam segala hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.

Menurut Agoes (2016:4) *auditing* adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Menurut Arens *et al.* (2015:2) *auditing* adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. *Auditing* harus dilakukan oleh orang yang kompeten.

2.2 Asersi Manajemen

Menurut Hery (2017) Asersi manajemen merupakan pernyataan manajemen (secara tersirat) tentang transaksi atau peristiwa, saldo akun, serta penyajian dan pengungkapan yang terkait dengan laporan keuangan. Asersi manajemen berkaitan langsung dengan standar akuntansi karena merupakan bagian dari kriteria yang digunakan manajemen untuk mencatat dan mengungkapkan informasi dalam laporan keuangan.

Asersi tentang saldo akun menurut Hery (2017) diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Eksistensi
Asersi ini berkaitan dengan apakah aset, liabilitas, dan ekuitas yang tercantum dalam laporan posisi keuangan benar-benar ada pada tanggal laporan posisi keuangan.
2. Kelengkapan
Asersi ini menyatakan apakah seluruh jumlah yang harus tercatat pada suatu akun benar-benar sudah dicantumkan. Pelanggaran atas asersi ini akan menimbulkan kurang saji akun.
3. Penilaian dan Alokasi
Asersi ini berkaitan dengan apakah aset, liabilitas, dan ekuitas telah dimasukkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang tepat atau dengan angka-angka yang wajar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.